

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman : 05

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabangan <input checked="" type="checkbox"/>	

Kualitas Laporan Keuangan Tercermin Melalui Opini BPK RI



PENGESAHAN - Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah menandatangani pengesahan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2019. TABANGAN/YULIANTINI

Sambung.

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun :

2	0	2	0
---	---	---	---



Subbagian Humas dan TU Kalan
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media :

Halaman :

Kompas	Kalteng Pos	Borneo News
Palangka Post	Tabengan	

PANGKALAN BUN - Kualitas laporan keuangan daerah tercermin melalui opini BPK-RI, dimana pada tahun 2019 laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi untuk ke enam kalinya dicapai Kabupaten yang berjuduk Bumi Marunting Batu Aji ini.

Wakil Bupati Kobar Ahmadi Riansyah mengemukakan pada Sidang Paripurna Ke XI masa

sidang Ke III tahun 2020, dalam agenda penyampaian pandangan Fraksi Fraksi DPRD Kobar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD tahun 2019.

Menurut Wakil Bupati, sesuai dengan Visi dan Misi dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan transparan.

“Ranperda tentang Per-

tanggungjawaban pelaksanaan APBD Kobar Tahun anggaran 2019 telah disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD Kobar yang merupakan bukti, antara DPRD dan Pemerintah Daerah bukan hanya mitra kerja tetapi lebih dari itu merupakan bagian dari unsur penyelenggaraan pemerintah di daerah yang mempunyai peran kebersamaan dalam membangun Kabupaten Kobar,” ujar Ahmadi Riansyah.

Menurut Ahmadi, Ranperda LKPJ pelaksanaan

APBD tahun 2019 yang telah di bahas bersama memiliki arti yang sangat penting karena laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, menunjukkan tingkat ketepatan terhadap peraturan perundang undangan dan menjadi dasar untuk perencanaan kebijakan dan aktivitas tahun anggaran berikutnya. c-uli